

KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA SOSIALISME DAN ISLAM

Aura Amelia Putri¹, Ellen Aprilia Elista Wardany², Evina Atiqotun Nisa³, Jasmine Fajariyah Abror⁴, Lucky Kirana Mutiara Gilang Dwi Nur Azizah⁵, Magfiro Citra Dewi⁶, Safana Aulia⁷, Taufiq Kurniawan⁸.

Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

1 26081194157@mhs.unesa.ac.id, 2 26081194127@mhs.unesa.ac.id,
3 26081194174@mhs.unesa.ac.id, 4 26081194202@mhs.unesa.ac.id,
5 26081194097@mhs.unesa.ac.id, 6 26081194184@mhs.unesa.ac.id,
7 26081194213@mhs.unesa.ac.id, 8 taufiqkurniawan@unesa.ac.id

ABSTRACT

Islamic economy is a system or economic science based on Islamic values, principles, and laws derived from Al-Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas. Meanwhile, the socialist economic system is an economic system that emphasises collective ownership and the dominant role of the government in regulating economic activities. Both systems pay attention to welfare and equalisation, but have different foundations and mechanisms. This research aims to examine the background, characteristics, principles, and differences between the socialist economic system and the Islamic economy, especially in resource ownership, the role of the state, and the distribution of wealth. The research uses the literature study method with a descriptive comparative approach through the study of various relevant literatures. The results of the study show that socialism prioritises state control, while the Islamic economy recognises individual ownership with sharia restrictions and emphasises justice, social responsibility, and benefit. Thus, both have similar welfare goals but with different approaches.

Keyword: *Socialist Economic System & Islamic Economy; Resource Ownership; Wealth Distribution; Community Welfare*

ABSTRAK

Ekonomi Islam merupakan sistem atau ilmu ekonomi yang di dasari nilai-nilai, prinsip, dan hukum ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas. Sedangkan, sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif dan dominan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kedua sistem memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan pemerataan, tetapi memiliki landasan dan mekanisme yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, karakteristik, prinsip, serta perbedaan sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam, terutama dalam kepemilikan sumber daya, peran negara, dan distribusi kekayaan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif komparatif melalui kajian berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sosialisme mengutamakan pengendalian negara,

sedangkan ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dengan batasan syariah serta menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Dengan demikian, keduanya memiliki tujuan kesejahteraan yang serupa namun dengan pendekatan yang berbeda.

Kata Kunci: *Sistem Ekonomi Sosialis & Ekonomi Islam; Kepemilikan Sumber Daya; Distribusi Kekayaan; Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan bagaimana kegiatan ekonomi diatur untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai pemikiran ekonomi yang memiliki dasar, prinsip, dan tujuan yang berbeda. Di antaranya adalah sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam. Sistem ekonomi sosialis berkembang dengan menekankan kepentingan bersama dan peran negara dalam kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam menjadikan nilai dan norma agama sebagai dasar dalam mengatur perilaku ekonomi. Perbedaan landasan tersebut menyebabkan kedua sistem memiliki karakteristik yang berbeda dalam memandang kegiatan ekonomi, kepemilikan, dan kesejahteraan masyarakat. (Fudhail Rahman, 2021)

Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu pemikiran ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama sebagai perhatian utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini memberikan peran yang besar kepada negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Pemikiran sosialis juga berkembang sebagai kritik terhadap ketimpangan ekonomi yang muncul dalam sistem yang terlalu menekankan kepemilikan dan kebebasan individu. Dalam perkembangannya, sosialisme mengalami perubahan dan menghadapi berbagai persoalan dalam penerapannya, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet yang kemudian menyebabkan pengaruh sistem sosialis semakin berkurang dalam perekonomian dunia. (Ikbal et al., 2023)

Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis, ekonomi Islam menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan pencapaian keuntungan atau pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga perilaku manusia dalam memperoleh dan menggunakan harta tidak dapat dipisahkan dari nilai agama. Dengan demikian, ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam kehidupan ekonomi. (Fudhail Rahman, 2021)

Secara historis, ekonomi Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah saw. Dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa tersebut, berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara, dan mekanisme pasar telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah memiliki sejarah yang panjang serta mencakup berbagai aspek dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam juga memiliki sejumlah instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba yang digunakan untuk mendukung terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian. (Helda Rostiani et al., 2025)

Ekonomi Islam juga memiliki konsep kepemilikan yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Kepemilikan individu tetap diakui, tetapi penggunaannya tidak bersifat bebas tanpa batas karena harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memperhatikan kepentingan

masyarakat. Pengelolaan dan distribusi harta menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam berusaha menggabungkan kepentingan individu dengan tanggung jawab sosial melalui aturan yang bersumber dari syariah.(Helda Rostiani et al., 2025)

Sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam memiliki persamaan dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam landasan dan mekanisme pelaksanaannya. Sistem sosialis lebih menekankan kepentingan bersama melalui peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam mendasarkan kegiatan ekonomi pada nilai-nilai agama dan tetap mengakui kepemilikan individu dengan batasan tertentu. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara kedua sistem memandang kepemilikan, pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, serta hubungan antara kepentingan individu dan masyarakat.(Ikbal et al., 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam penting dilakukan untuk memahami latar belakang historis, karakteristik, serta prinsip yang mendasari kedua sistem tersebut. Kajian ini juga diperlukan untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya ekonomi serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini membahas sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam dengan meninjau aspek historis, karakteristik, serta perbedaan antara kedua sistem ekonomi.(Ikbal et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, perkembangan historis, karakteristik, dan prinsip sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam berdasarkan berbagai literatur yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan masing-masing sistem ekonomi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaannya.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur terkait. Sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik, terutama mengenai sejarah perkembangan, kepemilikan sumber daya, mekanisme kegiatan ekonomi, peran negara, distribusi kekayaan, dan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap identifikasi, seleksi, pembacaan, dan pencatatan, kemudian informasi dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan agar dapat dianalisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan aspek kepemilikan sumber daya, peran individu dan negara, mekanisme distribusi kekayaan, serta orientasi kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, analisis memperhatikan prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta kepemilikan individu dengan batasan tertentu. Sementara itu, ekonomi sosialis dikaji berdasarkan prinsip kepemilikan kolektif, perencanaan ekonomi, dan besarnya peran negara dalam produksi dan distribusi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik dan perbedaan utama kedua sistem ekonomi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HISTORIS EKONOMI SOSIALIS DAN EKONOMI ISLAM

1. Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis mulai berkembang sebagai sebuah pemikiran pada abad ke-19 sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme dan ketimpangan sosial yang muncul akibat Revolusi Industri. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Karl Marx bersama Friedrich Engels. Mereka berpendapat bahwa alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya ekonomi seharusnya tidak dikuasai oleh segelintir individu, tetapi dikelola secara ,untuk kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut kemudian dikenal sebagai sosialisme ilmiah atau Marxisme dan menjadi dasar bagi berbagai gerakan sosialis di dunia.(Foley, 2020)

Pada awal abad ke-20, gagasan ekonomi sosialis mulai diterapkan secara nyata setelah Vladimir Lenin memimpin Revolusi Rusia tahun 1917. Setelah itu, Uni Soviet membangun sistem ekonomi dengan kepemilikan negara yang kuat, perencanaan ekonomi terpusat, dan produksi yang diatur oleh pemerintah. Model tersebut kemudian memengaruhi sejumlah negara lain, seperti Tiongkok, Kuba, dan beberapa negara di Eropa Timur. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi sosialis mengalami berbagai perubahan dan kritik, terutama mengenai efisiensi produksi, kebebasan ekonomi, dan peran negara. Meskipun demikian, beberapa prinsip sosialis seperti pemerataan pendapatan, jaminan sosial, dan penyediaan layanan publik tetap memengaruhi kebijakan ekonomi di banyak negara hingga saat ini.(Tian & Chen, 2022)

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mulai berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada masa tersebut, kegiatan ekonomi seperti perdagangan, jual beli, kerja sama, dan pengelolaan harta sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Islam kemudian memberikan aturan agar kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Beberapa prinsip yang diperkenalkan antara lain larangan riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan maysir (perjudian), serta kewajiban membayar zakat. Selain itu, Islam juga mendorong kejujuran dalam perdagangan, kerja keras, dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu.(Arifin et al., 2023, 2023)

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perkembangan ekonomi Islam dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, pengelolaan Baitul Mal semakin berkembang sebagai lembaga yang mengatur keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ekonomi Islam juga berkembang melalui para ilmuwan seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun yang membahas masalah perpajakan, perdagangan, pasar, uang, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, ekonomi Islam berkembang dalam bentuk yang lebih modern, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, pasar modal syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional.(Batubara Ma et al., 2024)

B. KARAKTERISTIK

1. Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis memiliki karakteristik yang menekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ini, kepemilikan terhadap sumber daya atau alat produksi lebih banyak berada di tangan negara, sehingga pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi sosialis mengutamakan

kebersamaan atau kolektivisme, sehingga kepentingan individu lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik lainnya adalah pandangan bahwa sifat manusia dalam kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pola produksi yang diterapkan dalam suatu sistem ekonomi.(Daenuri, 2017)

2. Ekonomi Islam

Sementara itu, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Jurnal menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menjadi ciri ekonomi Islam, yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Aqidah menjadi dasar yang mendorong dan mengarahkan aktivitas ekonomi, sedangkan syari'ah berfungsi sebagai batasan dalam menentukan keputusan ekonomi agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, akhlak menjadi parameter dalam menjalankan dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.(Daenuri, 2017)

C. ANALISIS PERBEDAAN

1. Perbedaan Landasan Filosofis Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

1.1 Konsep Manusia

Dalam sistem ekonomi sosialis, manusia dipandang sebagai bagian dari masyarakat dan struktur sosial yang lebih luas. Kehidupan ekonomi individu berkaitan erat dengan hubungan produksi, kepemilikan, serta pembagian kelas, sehingga kepentingan kolektif sering ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Pandangan ini muncul dari anggapan bahwa kebebasan ekonomi yang tidak dibatasi dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dan menyebabkan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara ekonomi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi material, moral, sosial, dan spiritual. Manusia tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang berusaha memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Konsekuensinya, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi harus memperhatikan kepentingan pribadi sekaligus kemaslahatan masyarakat. Dalam sosialisme, pertanggungjawaban manusia terutama diarahkan kepada masyarakat dan negara, sedangkan dalam ekonomi Islam manusia bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan sesama. Oleh sebab itu, harta tidak boleh dimanfaatkan secara sewenang-wenang karena kepemilikan manusia bersifat terbatas dan merupakan amanah.(Abdul Gafur Rinaldi, 2025)

1.2 Sumber Nilai

Ekonomi sosialis berasal dari pemikiran dan pandangan manusia mengenai bagaimana kehidupan ekonomi seharusnya dijalankan dalam masyarakat. Pemikiran ini muncul karena adanya kritik terhadap kapitalisme yang dianggap dapat menimbulkan kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja. Oleh karena itu, ekonomi sosialis lebih menekankan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan sosial, kepentingan bersama, dan pemerataan. Salah satu pemikiran yang berpengaruh dalam perkembangan sosialisme adalah pemikiran Karl Marx yang membahas mengenai konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Dari pemikiran tersebut, muncul gagasan bahwa kegiatan ekonomi sebaiknya tidak hanya menguntungkan individu atau pemilik modal, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sumber nilai dalam ekonomi Islam berasal dari ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam juga

dikembangkan melalui *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*. Karena bersumber dari ajaran agama, ekonomi Islam memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga moral dan agama. Misalnya, dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus jujur, amanah, adil, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti *riba*, penipuan, dan perjudian. Jadi, sumber nilai ekonomi Islam berasal dari wahyu dan ajaran Allah, sedangkan ekonomi sosialis lebih didasarkan pada pemikiran manusia mengenai keadilan dan kehidupan sosial. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan utama antara keduanya. (Farid et al., 2024)

1.3 Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari ekonomi sosialis adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pemerataan. Dalam sistem sosialis, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, ekonomi sosialis lebih menekankan pada kepentingan bersama, pemerataan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih adil dan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Sedangkan tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, ekonomi Islam tidak hanya melihat apakah seseorang mendapatkan keuntungan atau memiliki kekayaan, tetapi juga melihat bagaimana kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Selain memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi Islam juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Jadi, kalau ekonomi sosialis lebih menekankan kesejahteraan bersama di dunia, ekonomi Islam menggabungkan kesejahteraan dunia dengan tujuan akhirat.

1.4 Kepemilikan dan Kebebasan Ekonomi

Salah satu ciri utama sistem ekonomi sosialis adalah penekanan pada kepemilikan bersama atau kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi atas alat produksi, seperti tanah, perusahaan, dan sumber daya strategis, dibatasi karena dianggap dapat menyebabkan penumpukan kekayaan dan eksploitasi tenaga kerja. Negara berperan mengatur proses produksi, menentukan prioritas ekonomi, serta mendistribusikan hasil produksi kepada masyarakat (Sehon, 2024). Meskipun demikian, penerapan sistem sosialis tidak selalu menghapus seluruh bentuk kepemilikan pribadi. Beberapa model masih memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki barang keperluan pribadi atau menjalankan usaha berskala kecil, sedangkan sektor-sektor produksi yang dianggap penting bagi kepentingan umum umumnya dikelola oleh pemerintah atau lembaga kolektif. (Istianah, 2022)

Sementara, ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara secara bersamaan. Kepemilikan pribadi memberi ruang kepada individu untuk bekerja, berusaha, berinvestasi, dan memperoleh keuntungan, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah serta memperhatikan hak orang lain. Kebebasan ekonomi juga dibatasi oleh larangan *riba*, ketidakpastian yang berlebihan, perjudian, penipuan, monopoli yang merugikan, dan praktik eksploitasi. Selain itu, zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan menimbun harta berfungsi sebagai sarana distribusi agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu. Oleh karena itu, sosialisme cenderung membatasi kepemilikan pribadi demi kepentingan bersama, sedangkan ekonomi Islam tetap mengakui hak milik individu dengan disertai tanggung jawab moral dan sosial. (Hidayati et al., 2025)

1.5 Implikasi Terhadap Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Sistem ekonomi sosialis memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat melalui upaya pemerataan kekayaan dan sumber daya agar dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat. Negara memiliki peran besar dalam menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terencana agar tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Penerapan sistem ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih merata terhadap berbagai fasilitas. Namun, dominasi negara yang terlalu besar juga dapat menimbulkan masalah seperti birokrasi yang tidak efisien, kurangnya kebebasan individu, serta menurunnya motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.(Putri, 2025)

Sistem ekonomi sosialis memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat melalui upaya pemerataan kekayaan dan sumber daya agar dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat. Negara memiliki peran besar dalam menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara terencana agar tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Penerapan sistem ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih merata terhadap berbagai fasilitas. Namun, dominasi negara yang terlalu besar juga dapat menimbulkan masalah seperti birokrasi yang tidak efisien, kurangnya kebebasan individu, serta menurunnya motivasi untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.(Yahya, 2024)

2. Perbedaan Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

2.1 Kepemilikan faktor produksi

Dalam sistem kapitalis, kepemilikan faktor produksi bersifat individual dan mutlak. Setiap orang berhak menguasai aset produktif seperti tanah, modal, dan teknologi tanpa batasan signifikan, selama diperoleh melalui cara yang sah menurut hukum positif. Prinsip ini didasari oleh keyakinan bahwa kebebasan individu dalam mengejar kekayaan akan mendorong inovasi dan efisiensi. Ekonomi Islam, sebaliknya, mengakui kepemilikan pribadi namun dengan sifat yang terbatas dan bersyarat. Hakikatnya, seluruh harta di alam semesta adalah milik Allah, dan manusia hanya memegangnya sebagai amanah. Kepemilikan individu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip halal-haram, tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*), dan tidak mengabaikan hak masyarakat atas sumber daya tertentu. Selain itu, Islam juga mengakui kepemilikan umum (seperti air, padang rumput, dan energi) yang tidak boleh diprivatisasi..(Faishal & Putri Atika Wardani, 2025). Perbedaan mendasar terletak pada sifat kepemilikan: kapitalisme menekankan hak absolut individu, sedangkan Islam menekankan kepemilikan relatif yang disertai tanggung jawab moral dan sosial.(Sagaf et al., 2024)

2.2 Mekanisme Pasar

Kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar bebas sebagai instrumen utama dalam alokasi sumber daya. Harga ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan tanpa intervensi pemerintah yang signifikan. Kebebasan berkontrak dan persaingan dianggap sebagai penggerak utama efisiensi, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan monopoli, eksploitasi, dan ketidakstabilan. Ekonomi Islam juga mengakui mekanisme pasar, namun dengan batasan etis dan syariah. Transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maysir (judi/spekulasi). Pasar dalam Islam bukan

sekadar arena pertukaran, tetapi juga ruang yang harus mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Instrumen sosial seperti zakat dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan (Dairobi, 2025). Dengan demikian, meskipun kedua sistem memanfaatkan pasar, kapitalisme menekankan kebebasan tanpa batas, sedangkan Islam memadukan kebebasan dengan nilai-nilai moral dan keadilan distributif. (Abdul Gafur Rinaldi, 2025)

2.3 Sistem Keuangan

Sistem keuangan kapitalis berbasis pada bunga (*interest*) sebagai imbalan atas penggunaan uang. Lembaga keuangan beroperasi dengan motif keuntungan, dan instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan derivatif dikembangkan untuk memaksimalkan return. Namun, sistem ini rentan terhadap spekulasi berlebihan, utang tidak produktif, dan krisis keuangan akibat pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil. Ekonomi Islam menolak sistem bunga karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam berbasis pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam*), dan sewa (*ijarah*). Setiap transaksi keuangan harus terkait dengan aset riil (*asset-backed*) dan aktivitas ekonomi yang produktif. Prinsip ini berfungsi sebagai penstabil otomatis yang mencegah gelembung spekulatif dan krisis sistemik (Amelia et al., 2025). Perbedaan utama terletak pada fondasi filosofis: kapitalisme memisahkan ekonomi dari nilai moral, sedangkan Islam mengintegrasikan keuangan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keterkaitan dengan sektor riil. (Abdul Gafur Rinaldi, 2025)

2.4 Peran Pemerintah

Dalam kapitalisme klasik, peran pemerintah dibatasi pada fungsi minimal seperti penegakan hukum, pertahanan, dan penyediaan barang publik. Intervensi pemerintah dalam pasar dianggap dapat mengganggu efisiensi alokasi sumber daya. Namun, dalam praktiknya, banyak negara kapitalis modern menerapkan bentuk intervensi tertentu untuk mengatasi kegagalan pasar dan ketidakadilan sosial. (Rodríguez Burgos, 2023). Ekonomi Islam menempatkan pemerintah sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Negara bertugas menegakkan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, mengelola kepemilikan umum, memastikan pembayaran zakat, dan menyediakan jaminan sosial (*takaful ijtimai*) bagi yang membutuhkan. Intervensi pemerintah dibenarkan selama bertujuan mencegah kezaliman, monopoli, dan kerusakan ekonomi. (Sopian, 2025) Jadi, meskipun kedua sistem mengakui peran negara, kapitalisme cenderung meminimalkan intervensi, sedangkan Islam memposisikan negara sebagai fasilitator keadilan dan penjaga kemaslahatan umum. (Rinaldi, 2025)

2.5 Distribusi Pendapatan

Kapitalisme tidak memiliki mekanisme redistribusi pendapatan yang wajib. Distribusi kekayaan bergantung pada hasil pasar, di mana individu dengan modal dan keterampilan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan lebih besar. Ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi alami dari perbedaan kemampuan dan usaha, meskipun beberapa negara kapitalis menerapkan kebijakan pajak progresif dan program kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan. Ekonomi Islam menekankan keadilan distributif melalui kombinasi mekanisme pasar yang adil dan instrumen redistribusi wajib serta sukarela. Zakat berfungsi sebagai instrumen wajib untuk mentransfer kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Selain itu, infak, sedekah, wakaf, dan aturan warisan yang jelas juga berkontribusi dalam pemerataan kekayaan. Kepemilikan harta diakui, tetapi disertai kewajiban sosial untuk tidak menimbun (*kantz*) dan tidak berlebihan (*israf*) (Budyono & Wartoyo, 2025). Dengan demikian, kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar dan kebijakan opsional untuk

distribusi, sedangkan Islam mengintegrasikan keadilan distributif sebagai bagian dari sistem ekonomi itu sendiri. (Siti Nuraida et al., 2026)

3. Perbedaan Etika Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

3.1 Orientasi Etika

Etika dalam ekonomi Islam berorientasi pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Kejujuran diperlukan agar transaksi dilakukan secara terbuka dan tidak merugikan pihak lain. Sementara itu, keadilan berarti setiap pihak mendapatkan haknya secara seimbang dan tidak terjadi eksploitasi. Ekonomi Islam juga melarang praktik yang dapat merugikan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dan saling menguntungkan. (Nurishak et al., 2025)

Selain berorientasi pada keuntungan, ekonomi Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan penggunaan harta untuk kebaikan bersama. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah, sehingga manusia tidak boleh menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, orientasi etika ekonomi Islam adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga membawa keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat. (Nurishak et al., 2025)

3.2 Kebebasan Berusaha dan Batasan Normatif

Dalam ekonomi sosialis, kebebasan perusahaan atau individu jauh lebih terbatas karena kegiatan ekonomi berada di bawah kendali pemerintah. Pemerintah menguasai sumber-sumber ekonomi, menentukan sistem produksi, serta mengatur harga dan distribusi barang. Bahkan, dalam prinsip dasarnya tidak terdapat kepemilikan individu atas sumber pendapatan dan alat produksi. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan ekonomi, tetapi akibatnya ruang individu atau perusahaan untuk menentukan kegiatan ekonominya sendiri menjadi terbatas. (Ikbal et al., 2023)

Dalam ekonomi Islam, perusahaan atau individu diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan jual beli. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh nilai-nilai agama. Setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, moralitas, dan kemaslahatan bersama. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa menurut Al-Faruqi, moralitas sangat penting dalam hubungan transaksi antarmanusia. Jadi, perusahaan boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh mengabaikan aturan agama dan merugikan pihak lain. (Ikbal et al., 2023)

3.3 Konsep Keadilan

Sistem ekonomi sosialis, keadilan ekonomi diwujudkan melalui pemerataan kekayaan dan sumber daya kepada seluruh masyarakat. Sosialisme menekankan kepemilikan bersama atau negara atas alat-alat produksi agar tidak terjadi dominasi individu atau kelompok tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Hasil produksi kemudian didistribusikan secara lebih merata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, negara berperan dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi sosialis lebih menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. (Putri, 2025)

Keadilan merupakan landasan utama dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya berarti pemerataan kekayaan, tetapi juga mencakup perlindungan hak individu, tenaga kerja, dan konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, setiap pihak harus diperlakukan secara adil, jujur, dan terbuka. Karena itu, Islam melarang praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti riba,

maysir, gharar, penipuan, penyalahgunaan takaran dan timbangan, serta monopoli. Keadilan juga diwujudkan melalui zakat dan wakaf sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan Bersama. (Hana Malika Rahmah Sitorus & Fadila Putri, 2025)

3.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam ekonomi Islam, tanggung jawab sosial dan lingkungan muncul dari konsep bahwa manusia hanya sebagai khalifah/pengelola, sedangkan kepemilikan mutlak atas alam dan segala isinya adalah milik Allah. Karena itu, harta yang dimiliki manusia merupakan amanah yang harus digunakan dengan baik dan tidak boleh merugikan orang lain maupun merusak lingkungan. Manusia juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, misalnya melalui zakat, sedekah, dan bentuk bantuan sosial lainnya. Dalam praktik bisnis modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui CSR, yaitu perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam ekonomi Islam, CSR tidak hanya dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan nilai tauhid, khalifah, keadilan, ukhuwah, dan maslahah. Jika dalam ekonomi sosialis, tanggung jawab sosial lebih ditekankan pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan individu atau pemilik modal, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, pengelolaan sumber daya yang dianggap penting bagi masyarakat cenderung ditempatkan di bawah kepemilikan atau pengawasan negara. (Putri, 2025)

3.5 Implementasi Bagi Praktik Bisnis Kontemporer

Praktik bisnis kontemporer, ekonomi Islam diterapkan dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah meskipun bentuk bisnisnya sudah berkembang mengikuti zaman. Penerapannya dapat dilihat dari penggunaan akad seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah sebagai alternatif transaksi yang menghindari riba dan spekulasi berlebihan. Selain itu, prinsip halal juga diterapkan dalam rantai pasok makanan, farmasi, dan kosmetik. Perkembangan teknologi juga membuat prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam investasi syariah, *e-commerce*, dan *fintech syariah*. Dengan begitu, kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejujuran, transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah. (Faishal & Putri Atika Wardani, 2025)

Sementara itu, sosialisme dalam praktik bisnis kontemporer lebih menekankan peran negara dalam mengatur dan mendistribusikan sumber daya ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Namun, dalam perkembangannya, sistem yang berorientasi sosialis juga mulai memberikan ruang bagi mekanisme pasar, investasi asing, dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi modern cenderung lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya menerapkan sosialisme secara murni. (Sulton et al., 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, sistem ekonomi sosial dan ekonomi Islam sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi. Keduanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi memiliki landasan dan cara pengelolaan yang berbeda. Sistem ekonomi sosial lebih menekankan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan ajaran Islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan nilai moral. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi tetap diperbolehkan, tetapi harus

disertai tanggung jawab sosial. Selain itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sama dengan sistem ekonomi sosial, keduanya berbeda dalam landasan dan penerapannya, terutama dalam pengelolaan kegiatan ekonomi, kepemilikan individu, tanggung jawab sosial, serta peran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur Rinaldi. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AS AN ALTERNATIVE ECONOMIC SYSTEM: A THEMATIC CONCEPTUAL LITERATURE. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.62952/shacral.v2i1.68>
- Amelia, C., Hernawati, Aulia, Z. I., & Rinda Asyuti. (2025). Basic Concepts of Islamic Economics. *International Journal of Economics (IJE)*, 4(2), 1455–1460. <https://doi.org/10.55299/ijec.v4i2.1596>
- Batubara Ma, M., Ivanka, M., Ningsih, N. W., Nasution, S. Z., & Sitompul, G. S. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Aktivitas Perbankan pada Rasulullah dan Masa Khulafa Al-Rasyidin. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.242>
- Budiyono, A. & Wartoyo. (2025). Wealth Distribution in the Islamic Economic System Conceptual Foundations and Their Relevance to Contemporary Economic Justice. *Journal of Integrated Socio-Economic Systems and Islamic Finance*, 1, 84–91. <https://doi.org/10.65638/vxg07803>
- Daenuri, A. (2017). *SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM*.
- Dairobi. (2025). PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME(SUATU KAJIAN LITERATUR). *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(1). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i1.328>
- Faishal, A. & Putri Atika Wardani. (2025). Konsep Harta dan Kepemilikan menurut Pandangan Ekonomi Islam. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(11), 60–68. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6940>
- Farid, N., Anjum, T., & Farid, A. (2024). Islamic Socialism and Communist Socialism: A Review of Comparative Analytical Studies. *Global Sociological Review*, IX(III), 35–44. [https://doi.org/10.31703/gsr.2024\(IX-III\).04](https://doi.org/10.31703/gsr.2024(IX-III).04)
- Foley, D. K. (2020). Socialist alternatives to capitalism I: Marx to Hayek. *Review of Evolutionary Political Economy*, 1(3), 297–311. <https://doi.org/10.1007/s43253-020-00012-5>
- Fudhail Rahman, Muh. (2021). Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika Keagamaan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 353. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1120>
- Hana Malika Rahmah Sitorus & Fadila Putri. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 240–248. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>
- Helda Rostiani, Aditya, & Saiful Muchlis. (2025a). Transformasi Nilai Ekonomi: Kajian Historis Perbedaan Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/10.63822/ka1y1j23>

- Helda Rostiani, Aditya, & Saiful Muchlis. (2025b). Transformasi Nilai Ekonomi: Kajian Historis Perbedaan Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/10.63822/ka1y1j23>
- Hidayati, A., Iska, S., Marlion, F. A., Jannah, M., & Putri, S. (2025). ANALISIS KOMPARATIF SISTEM EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME, DAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFISIENSI. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(4), 7648–7661. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i4.4708>
- Ikbal, M., Dewi, N. D. T., & Syaifuddin, H. (2023). *Problematisasi Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi*.
- Istianah, I. (2022). ECONOMIC GROWTH AND EQUITY PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *IDEALITA: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.62525/10.62525/idealita.2022.v2.i1.70-89>
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. (2025). *ETIKA EKONOMI ISLAM: MENELUSURI KETERKAITAN KONSEP MORAL DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Putri, T. E. (2025). *Sosialisme dalam Perspektif Ekonomi antara Kebaikan, Kelemahan, dan Penolakan terhadap Hak Individu*.
- Rodríguez Burgos, O. L. (2023). *The Role of Government and the Free Market* (2023rd ed.). Instituto de Libertad Económica. <https://doi.org/10.53095/13582008>
- Sagaf, U., Ibrahim, I., & Rafiuddin, R. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 83–92. <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.3240>
- Sehon, S. R. (2024). Defining “Socialism.” In S. R. Sehon, *Socialism* (1st ed., pp. 18–38). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197753330.003.0002>
- Siti Nuraida, Hamdiah Hamdiah, & Erwan Setyanor. (2026). Ekonomi Islam dalam Menjawab Tantangan Ketimpangan Sosial Global. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 3(1), 25–33. <https://doi.org/10.61132/eksap.v3i1.2043>
- Sopian. (2025). Revisiting Adam Smith’s Free Market through the Lens of Islamic Economics. *Journal of Economic Studies*, 9(1), 29–38. <https://doi.org/10.32506/joes.v9i1.797>
- Sulton, M. A., Putri, I. P., & Aldi, M. (2026). *Kesamaan Mendalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis: Sebuah Analisis Paradoks di Era Modern*.
- Tian, G., & Chen, X. (2022). The Origin of the Traditional Socialist Economic System and the Soviet Model. In G. Tian & X. Chen, *China’s Reform: History, Logic, and Future* (pp. 71–77). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5470-2_6
- Yahya, M. H. (2024). *STAI Ma’had Ali Cirebon, Indonesia* nurjanah@staima.ac.id.